

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN
PANGKEP**

*AN ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT OF
ECONOMIC PERFORMANCE OF PANGKEP REGENCY*

INDAH YULIANI MONE



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN
PANGKEP**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Master

**Program Studi
Magister Keuangan Daerah (MKD)**

Disusun dan diajukan oleh

INDAH YULIANI MONE

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

T E S I S

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN
PANGKEP**

Disusun dan diajukan oleh :

INDAH YULIANI MONE

P2600211506

Telah di pertahankan didepan panitia ujian tesis

Pada tanggal 26 November 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec.

Ketua

Dr. Mediaty, SE., M.Si, Ak.

Anggota

Ketua Program
Magister Keuangan Daerah,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Dr. Sumardi, SE.,M.Si

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH YULIANI MONE
Nomor Mahasiswa : P2600211506
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Makassar, November 2013

Yang Menyatakan,

INDAH YULIANI MONE

ABSTRAK

INDAH YULIANI MONE. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep* (dibimbing oleh **H. Rahardjo Adisasmita** dan **Hj. Mediaty**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah terhadap Kinerja ekonomi secara simultan dan parsial.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan populasi berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Sampel penelitian adalah laporan terget dan realisasi APBD dalam sepuluh tahun (2002-2011) dan nilai PDRB dalam sepuluh tahun (2003-2012) melalui sampel puepositive. Data analisis dengan analisis regresi linier berganda melalui program SPSS 20,0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep. Secara parsial pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan, belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan, serta pembiayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan. Kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebesar 99,0%, sedangkan sisanya sebesar 1,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar objek penelitian ini.

Kata kunci : pendapatan, belanja, pembiayaan, kinerja ekonomi

ABSTRACT

INDAH YULIANI MONE. *An Anayisis of Regional Financial Management of Economic Performance of Pangkep Regency* (supervised by **H. Rahardjo Adisasmita** and **Hj.Mediaty**)

The research aims to determine and analyze the influence of management of regional financial based on regional revenue, regional expenditure towards economic performance of Pangkep Regency simultaneously and partially.

Populations of this research were the report of budget realization, balance sheet and notes of the financial statements of Pangkep Government. Based on the existing population, the samples were selected by using purposive sampling i.e. targets and actual budget reports within ten years (2002-2011) and the value of GDP in ten years (2003-2012). Analysis of the data used was Multiple Linear Regression with SPSS 20.0.

The results indicate that the regional financial management based on revenue, expenditure and financing regency simultaneously and significant have positive impact on economic performance of Pangkep Regency. Partially, regional revenue has significant and positive influence and regional expenditure has significantly negative impact. The regency economic performance is influenced by regional revenue, regional expenditure amount to 99.0 % while the rest is 1.0% is influenced by other variables out of this research.

Keywords: revenue, expenditure, economic performance

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanaahu Wataala, karena hanya limpahan rahmat, karunia dan magfira-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Master pada Program Studi Magister Keuangan Daerah (MKD) Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini penulis banyak menghadapi hambatan dan rintangan terutama karena keterbatasan-keterbatasan penulis miliki, namun kesemuanya itu telah dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec.**, dan **Dr. Mediaty, SE., M.Si, Ak.** selaku Komisi Penasehat, terima kasih atas bimbingannya dalam penyusunan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingannya dalam penulisan tesis ini.

Bapak Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Pangkep. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangkep beserta Staf atas izin, dan dukungan moril yang telah diberikan kepada penulis.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin. Bapak/Ibu dosen atas ilmu yang telah diberikan, para staf administrasi pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Ibunda Hj. Nursiah Tantu, Suami Soenandar Rahman dan anakku tersayang Muhammad Aqil Bassam S, serta keluarga tercinta

atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

Seluruh rekan-rekan Mahasiswa angkatan XVII MKD, yang selama ini bahu membahu dalam mengatasi segala rintangan dan kasih atas partisipasinya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan tesis ini, sehingga kami menerima saran yang sifatnya membangun. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya dan mudah-mudahan mendapat balasan pahala yang setimpal.

Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan yang terbaik kepada kita semua. Amin.

Makassar, Nopember
2013

INDAH YULIANI MONE

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS		iv
ABSTRAK		v
ABSTRACT		vi
PRAKATA		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR LAMPIRAN		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	12
	C. Tujuan Penelitian	12
	D. Manfaat Penelitian	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS	13
	A. Tinjauan Pustaka	13
	1. Manajemen Keuangan	13
	2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	16
	3. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah	22
	4. Pengelolaan Keuangan Daerah	25
	5. Konsep Kinerja Ekonomi Daerah	47
	6. Laporan Keuangan Daerah	63
	7. Penelitian Terdahulu	67
	B. Kerangka Pemikiran	74
	C. Hipotesis	78
BAB III	METODE PENELITIAN	80

	A. Rancangan Penelitian	80
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	81
	C. Jenis dan Sumber Data	81
	D. Teknik Pengumpulan Data	82
	E. Populasi dan Sampel	83
	F. Metode Analisis	83
	G. Definisi Operasional	84
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
	A. Kinerja Ekonomi Daerah	86
	B. Hasil Penelitian	94
	C. Pembahasan Hasil Penelitian	106
BAB V	PENUTUP	122
	A. Kesimpulan	122
	B. Saran	123
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pangkep Tahun 2003-2012	9
2.1	Mapping Penelitian Terdahulu	71
4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep Tahun 2003 – 2012	89
4.2	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar harga Konstan 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2003 - 2012	90
4.3	Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun 2002 – 2011 (dalam Rp)	95
4.4	Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun 2002 – 2011 (dalam Rp)	97
4.5	Anggaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun 2002 – 2011 (dalam Rp)	99
4.6	Hasil Uji Simultan (Uji-F)	101
4.7	Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)	103
4.8	Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	106
4.9	Matriks Hubungan Variabel X dan Variabel Y Berdasarkan Hasil Penelitian	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pangkep Tahun 2003-2012	9
1.2	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep Tahun 2003-2012	10
2.1	Kerangka Pemikiran	78
4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep Berdasarkan Lapangan Usaha	91
4.2	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 Kabupaten Pangkep	92
4.3	PDRB Perkapita Kabupaten Pangkep dan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2012	93
4.4	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2002-2011	95
4.5	Persentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2002-2011	98
4.6	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2002-2011	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Perkembangan PDRB Serta Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pangkep Tahun 2003-2012	129
	Pertumbuhan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kab. Pangkep	129
2	Hasil Analisis Regresi	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber keuangan yang memadai. Disadari bahwa sumber keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh

pemerintah daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai berbagai aktivitas daerah, tidak seimbang dengan besarnya belanja dan pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun, mobilisasi sumber dana secara ekspresi dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif bagi kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk menunjang peningkatan kinerja ekonomi daerah. Diketahui banyak aspek keuangan daerah yang penting, namun peneliti tertarik meneliti mengenai pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kinerja ekonomi daerah berdasarkan tingkat realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Pangkep.

Tata kelola keuangan daerah telah diterapkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pengelolaan keuangan pemerintahan. Reformasi tata kelola keuangan daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi tata kelola keuangannya tetapi juga menerapkan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja ekonomi daerah. Reformasi ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental khususnya bagi pengelolaan keuangan daerah. Secara substantif mengandung pengertian sumber-sumber keuangan

daerah perlu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai pencapaian kinerja ekonomi daerah.

Otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri Menurut Oates (1993) dalam Sasana (2009) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Menurut Halim (2004), pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Saragih (2003) dalam Sularso (2011) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Sidik (2000) dalam Maryati (2007), menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003) dalam Darwanto (2007) juga menyatakan menyatakan hal sama. Bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008) dalam Sularso (2011) menyatakan bahwa investasi termasuk dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure*, yang didefinisikan sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1993) dalam Haryanto (2013), yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Sedangkan menurut Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993) dalam Haryanto (2013), mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang

semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Saat respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Hines, 1995) dalam Lambut (2013).

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005) dalam Adi (2007). Lin dan Liu dalam Priyo (2006) dalam Setiyawati (2007) menyatakan bahwa belanja pembangunan merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah

daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut P. Eko Prasetyo (2009) dalam Haryanto (2013), istilah pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009 dalam Haryanto, 2013). Menurut Kuznet dalam Todaro (2003) dalam Sasana (2009) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro, 2004; Gaspersz dan Feonay, 2003). Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada

peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997 dalam Rustiono, 2008). Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Lincoln Arsyad, 1999 dalam Caska, 2008). Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa teori basis ekonomi yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.

Menurut Arsyad (1999) dalam Setiyawati (2007) bahwa pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Susanti,dkk (2000) dalam Maryati (2010) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian.

Atas pentingnya pengelolaan keuangan, maka digunakan teori perimbangan (*equilibrium theory*) menurut Ritzer (2007:59) bahwa pengelolaan keuangan harus dikelola secara berimbang antara besarnya pendapatan yang diperoleh harus sama dengan besarnya belanja dan biaya yang dikeluarkan. Pandangan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan rancangan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pengelolaan kas, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta pembinaan dan pengawasan keuangan daerah harus dikelola secara berimbang.

Kinerja ekonomi adalah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi. Adanya data pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauhmana kinerja pemerintah pada berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Adanya pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian, dan sebaliknya bila negatif berarti menunjukkan adanya penurunan kinerja perekonomian.

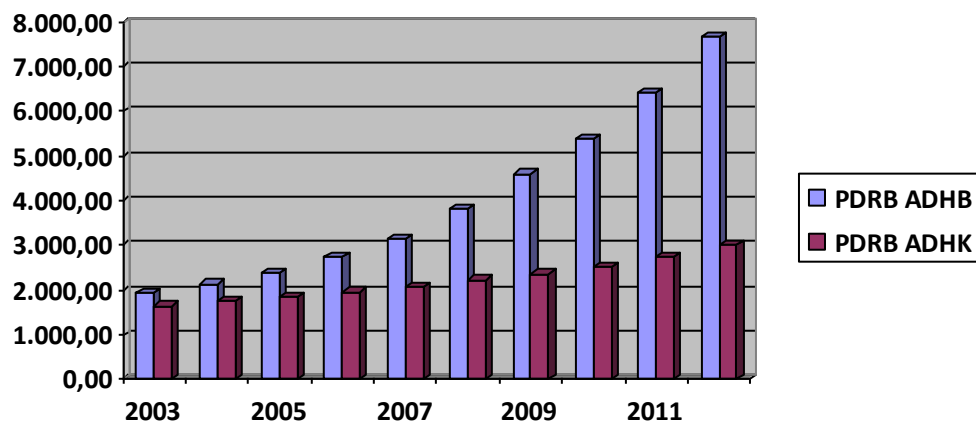
Untuk mengukur pencapaian kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep, dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2003 - 2012 pada Tabel dan Gambar 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep Tahun 2003-2012

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2003	1.936,94	1.656,41	-
2004	2.145,41	1.758,99	6,19
2005	2.386,67	1.857,32	5,59
2006	2.735,86	1.967,63	5,94
2007	3.153,30	2.088,09	6,12
2008	3.826,20	2.237,50	7,16
2009	4.597,93	2.369,77	5,91
2010	5.379,30	2.519,98	6,34
2011	6.413,16	2.751,14	9,17
2012	7.676,58	3.015,46	9,61
Rata-rata			6,20

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep 2013

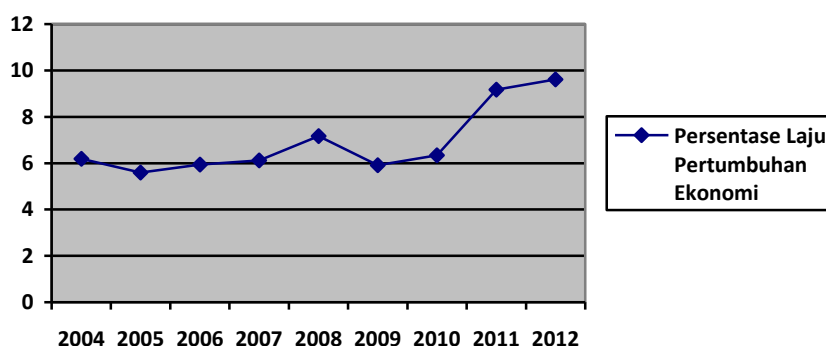
Gambar 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Pangkep Tahun 2003 – 2012



Berdasarkan data pada Tabel dan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2003-2012 terjadi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan

perekonomian di Kabupaten Pangkep selama kurun waktu tersebut telah mengalami kemajuan yang berarti berdasarkan hasil perhitungan PDRBnya. Akan tetapi bila dilihat dari persentase laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkep dari tahun ke tahun berfluktuasi (Gambar 1.2), seperti misalnya pada tahun 2005 sampai 2008 laju pertumbuhan mengalami peningkatan namun pada tahun 2009 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2011. Penurunan persentase laju pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor situasi perekonomian yang tidak stabil pada tahun 2009, seperti kenaikan harga barang dan biaya produksi, berkurangnya jumlah tenaga kerja dan menurunnya jumlah investasi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Kondisi perekonomian yang tidak stabil mengakibatkan menurunnya kinerja ekonomi daerah pada tahun yang bersangkutan.

Gambar 1.2
Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pangkep Tahun 2003 – 2012



Mankiw (2006), mengatakan bahwa dalam konsep dasar ekonomi makro, indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai pasar semua barang dan

jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Perhitungan pertumbuhan ekonomi tersebut dalam sistem perekonomian terbuka digambarkan oleh persamaan: $Y = C (Y \cdot T) + I + G + X \cdot M$, di mana Y = Produk Domestik Bruto, C = konsumsi masyarakat, T = Pajak/Penerimaan Pemerintah, I = Investasi Sektor Swasta, G = Pengeluaran/Belanja Pemerintah, X = Ekspor dan M = Impor. Dalam konsep regional, Y dianalogikan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu indikator ekonomi makro suatu daerah yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dari persamaan tersebut maka secara teoritis $Y = f (T)$ dan $f (G)$, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang diukur dengan PDRB dipengaruhi secara negatif oleh T (pajak/penerimaan Pemerintah Daerah) dan dipengaruhi secara positif oleh G (Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi daerah dengan meneliti sejauhmana pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan salah satu bentuk instrumen kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah daerah, dengan memilih judul: Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep?
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara parsial terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pengambil keputusan pada Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui pencapaian kinerja ekonomi daerah sesuai dengan PDRB.
2. Sebagai bahan acuan standar atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu dari beberapa fungsi manajemen, yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi pembiayaan/pengeluaran dan fungsi pendapatan/ penerimaan. Fungsi keuangan menyangkut kelangsungan hidup organisasi, di mana berhubungan erat dengan masalah bagaimana mendapatkan serta mengalokasikan dana organisasi secara efisien dan efektif, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Budi, 2006:74).

Berdasarkan hal tersebut di atas dan melihat perkembangan dunia sektor keuangan dewasa ini, banyak organisasi baik yang berskala besar maupun kecil, apakah yang bersifat profit maupun non profit akan mempunyai perhatian besar di bidang keuangan. Keberhasilan maupun kegagalan usaha hampir sebagian besar ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan. Dengan kata lain masalah yang biasa timbul dalam setiap organisasi berimplikasi terhadap bidang keuangan.

Mulyono (2006:87) mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut di sebut sebagai manajer keuangan. Perkembangan organisasi di masa kini, manajer keuangan harus mempunyai peranan yang sangat dinamis, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya, tugas manajer keuangan hanya mencari dana dan mengelola posisi kas. Saat ini faktor-faktor eksternal mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap organisasi, membuat para manajer keuangan harus mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi disekitarnya.

Perkembangan manajemen keuangan sangat cepat dikarenakan perkembangan teknologi informasi, di mana dengan informasi berbagai kalangan dapat melakukan transaksi keuangan dengan cepat. Hal ini mengakibatkan peran manajer keuangan menjadi semakin penting dalam mengendalikan dan membuat keputusan-keputusan keuangan.

Baswir (1997:5) dikatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama yaitu keputusan sehubungan dengan investasi, pendanaan dan manajemen aktiva.

Riyanto (1995:4) mengemukakan pengertian fungsi manajemen keuangan (pembelanjaan) yaitu meliputi semua aktivitas organisasi yang bersangkutan dan usaha mendapatkan dana serta menggunakan atau mengalokasikan dana harus dilakukan secara efisien. Prinsip manajemen organisasi menuntut agar baik dalam memperoleh maupun dalam menggunakan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Tugas manajer keuangan dalam menjalankan fungsinya berkaitan langsung dengan keputusan pokok organisasi dan pengaruh terhadap nilai organisasi. Berdasarkan beberapa definisi dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas dari seorang manajer keuangan suatu organisasi dalam memperoleh dan mengalokasikan dana secara efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi serta peningkatan nilai organisasi dapat tercapai.

Penerapan manajemen keuangan yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan unsur pencapaian target dan realisasi sebagai bagian dari analisis manajemen keuangan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah

harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Menurut Jhingan (1999:53) anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 903/2735/SJ tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD, maka hendaknya penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab, mengingat anggaran daerah merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka APBD harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Disiplin Anggaran, APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilahan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukkan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang teratur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap Pos/Pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

- c. Keadilan Anggaran, Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- d. Efisiensi dan Efektivitas anggaran, Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.
- e. Format Anggaran, Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk Dana Cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mustopadidjaya (1997:5) mengatakan bahwa dalam perspektif desentralisasi, pemerintah daerah sebaiknya memainkan peran dalam penyusunan anggaran sebagai berikut:

- a. Menetapkan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan penduduknya, bukan berdasarkan perintah penyeragaman dari pemerintah nasional,
- b. Mengatur keuangan daerah termasuk pengaturan tingkat dan level pajak dan pengeluaran yang memenuhi standard kebutuhan publik di wilayahnya;
- c. Menyediakan pelayanan dan servis pajak sebagaimana yang diinginkan oleh publik dan kepentingan daerah masing-masing;
- d. Mempertimbangkan dengan seksama keuntungan sosial dari setiap program dan rencana pembangunan, bukan hanya kepentingan konstituen tertentu;
- e. Menggunakan daya dan kekuatan secara independen dalam mewujudkan dan menstimulasikan konsep kinerja ekonomi daerah;
- f. Memfokuskan agenda dan penetapan program ekonomi dalam anggaran yang mendukung kestabilan pertumbuhan dan penyediaan lapangan kerja di daerah;
- g. Menentukan batas kenormalan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah;
- h. Mencari dan menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi nasional.

Baswir (1997:26-39), mengemukakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan suatu struktur dan klasifikasi tertentu adalah suatu langkah penting untuk mendapatkan sistem penganggaran yang baik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kemampuan pemerintah. Penyusunan anggaran tidak bisa dilepaskan dari karakteristik suatu daerah, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran.

Kunarjo (1996:81) mengatakan bahwa tujuan perencanaan pengeluaran adalah untuk menjamin bahwa suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang terbatas, telah dipertimbangkan pada prioritas kebutuhan dan kibat yang akan timbul, misalnya apakah pengalokasian dana dapat mengakibatkan inflasi. Pada prinsipnya perencanaan pengeluaran oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh masyarakat.

Pudjosukanto (1993:124) mengatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan "*self supporting*" dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Secara realistis, praktek penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini

terlihat dari program kerja yang ada dalam keuangan daerah cenderung merupakan arahan dari pemerintah pusat sehingga besarnya alokasi dana rutin dan pembangunan daerah belum didasarkan pada standard analisa belanja tetapi dengan menggunakan pendekatan tawar menawar inkremental (*incremental bargaining approach*).

3. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah merupakan upaya memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah (Sidik, 1999:20).

Menurut Arsyad (1999:108) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhususan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik

secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan keputusan, inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Adisasmita, 2011:21).

Pada hakekatnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan pada dua hal yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas faktor menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (Adisasmita, 2011:21).

Beberapa teori untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah yaitu teori basis ekonomi, teori kawasan dan teori daya tarik industri. Adisasmita (2011:21) mengemukakan teori basis ekonomi yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di sektor industri yang menggunakan sumber daya produksi lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan outputnya di ekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita melalui penciptaan peluang kerja di daerah tersebut.

Selanjutnya teori kedua yaitu teori kawasan yang digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan yang dianggap paling tepat di suatu daerah. Inti pemikiran teori ini didasarkan pada sifat nasional yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin

dengan biaya serendah mungkin. Ketiga, teori daya tarik industri, dalam upaya pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering dipertanyakan jenis-jenis industri yang tepat untuk dikembangkan, dan ini merupakan masalah membangun portofolio industri suatu daerah.

Arsyad (1999:118) menyatakan bahwa teori pembangunan yang ada tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada.

Berkaitan dengan paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah. Arsyad (1999:19) mengemukakan pendapatnya yakni: pertama, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Kedua, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Ketiga, keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Dan keempat, pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi.

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi daerah untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk

memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggungjawab.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam pengelolaan bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah, antara lain (Natahiddin, 2008: 167): a) daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah; b)

daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah; 3) daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan 4) daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Natahiddin, 2001:167): a) pengelolaan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki; b) kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan c) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu dari beberapa fungsi manajemen, yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi personalia. Fungsi keuangan menyangkut kelangsungan hidup organisasi, di mana berhubungan erat dengan masalah bagaimana mendapatkan serta mengalokasikan dana organisasi secara efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan melihat perkembangan dunia sektor bisnis dewasa ini, banyak organisasi baik yang berskala

besar maupun kecil, apakah yang bersifat profit maupun *non profit* akan memunyai perhatian besar di bidang keuangan. Keberhasilan maupun kegagalan usaha hampir sebagian besar ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan. Dengan kata lain masalah yang biasa timbul dalam setiap organisasi berimplikasi terhadap bidang keuangan.

Mulyono (2006:87) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut disebut sebagai manajer keuangan. Perkembangan organisasi di masa kini, manajer keuangan harus memunyai peranan yang sangat dinamis, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya, tugas manajer keuangan hanya mencari dana dan mengelola posisi kas. Saat ini faktor-faktor eksternal memunyai pengaruh yang cukup besar terhadap organisasi, membuat para manajer keuangan harus memunyai fleksibilitas yang cukup tinggi agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Perkembangan pengelolaan keuangan sangat cepat dikarenakan perkembangan teknologi informasi, karena dengan informasi berbagai kalangan dapat melakukan transaksi keuangan dengan cepat. Hal ini mengakibatkan peran manajer keuangan menjadi semakin penting dalam mengendalikan dan membuat keputusan-keputusan keuangan.

Adisasmita (2011:5) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan

pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Fungsi pembuatan keputusan dari pengelolaan keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama yaitu keputusan sehubungan dengan investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva.

Riyanto (1995:4) mengemukakan pengertian fungsi pengelolaan keuangan (pembelanjaan) yaitu meliputi semua aktivitas organisasi yang bersangkutan dan usaha mendapatkan dana serta menggunakan atau mengalokasikan dana harus dilakukan secara efisien. Prinsip manajemen organisasi menuntut agar baik dalam memperoleh maupun dalam menggunakan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Mardiasmo (2002:85) memberikan pengertian fungsi pengelolaan keuangan adalah menyangkut keputusan investasi, pembiayaan dan deviden untuk suatu organisasi. Fungsi-fungsi ini harus sama dilaksanakan dalam organisasi bisnis, bidang pemerintah, maupun organisasi-organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana guna memaksimalkan nilai organisasi. Beberapa kegiatan yang terlibat yaitu:

- a. Dalam perencanaan dan perkiraan (*forecasting*), manajemen keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis yang umum.

- b. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya.
- c. Manajer keuangan harus bekerjasama dengan manajer lain di organisasi agar organisasi dapat beroperasi seefisien mungkin.
- d. Manajer keuangan menghubungkan organisasi pada pasar uang dan pasar modal, tempat dana diperoleh dan tempat surat berharga organisasi diperdagangkan.

Tugas manajer keuangan dalam menjalankan fungsinya berkaitan langsung dengan keputusan pokok organisasi dan pengaruh terhadap nilai organisasi. Berdasarkan beberapa definisi dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas dari seorang manajer keuangan suatu organisasi dalam memperoleh dan mengalokasikan dana secara efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi serta peningkatan nilai organisasi dapat tercapai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya negara (termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya) karena dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah menyangkut kepentingan rakyat banyak tentunya didasarkan pada produk-produk hukum.

Kebijakan umum pengelolaan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat di kemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut: a) dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktifitas; b) anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan; serta c) anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Regulasi Peraturan Pemerintah yang berlaku pada model analisis yang digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar rencana kerja anggaran perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas, sebagai berikut: 1) tahun 2003 s/d 2005 pengelolaan keuangan atau pengukuran Rencana Kerja Anggaran dalam penganggarannya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 2) tahun 2006 pengelolaan keuangan atau pengukuran Rencana Kerja Anggaran dalam penganggarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) tahun 2007 pengelolaan keuangan atau pengukuran Rencana Kerja Anggaran dalam penganggarannya berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan dasar model Analisis tersebut di atas, maka memperhatikan nilai-nilai satuan yang telah diatur di dalam penetapan atau peraturan, sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota DPRD (*lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4540*). Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD; 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang bentuk/Modal Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas yang mengisyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil/Pejabat yang melakukan perjalanan Dinas masing-masing dilengkapi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/ KMK 02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 4) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 65/II/Tahun 2005 tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan; dan 5) Analisis Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan harga pokok lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan setiap tahun.

Berikut akan diuraikan fungsi dan peranan Pemda dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, tujuan yang ingin dicapai, unsur-unsur pengelolaan keuangan daerah dan tolok ukur pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim (2004:82) bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola administrasi keuangan dan pendapatan daerah yang

tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya melaksanakan beberapa fungsi antara lain fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Penerapan ketiga fungsi ini diharapkan dapat memotivasi potensi ekonomi daerah, peningkatan taraf hidup maupun sektor-sektor kegiatan pembangunan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga merupakan rincian lebih lanjut dari Repeta Daerah dan juga Pola Dasar Pembangunan daerah, disebut sebagai rencana tahunan (termasuk rencana keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran). Bila di kaitkan dengan peranan pemerintah daerah, maka pada pokoknya anggaran harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya: 1) pertanggungjawaban pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah, misalkan untuk memperlancar proses kinerja ekonomi daerah; 2) hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan pemasukannya; dan 3) pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan yang pada akhirnya menjamin tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi beberapa satuan yang terpisah, antara lain yaitu :

1. Sekretaris Daerah (Sekda) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam menyiapkan Anggaran Tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran dan membuat catatan keuangan serta membukukannya. Semua tugas ini di jalankan dalam lingkungan Sekretariat oleh Biro atau Bagian Keuangan. Kepala Biro Keuangan bisa juga berperan sebagai penasehat keuangan daerah, tidak melalui Sekda. Tetapi kedudukan resminya berada di bawah Kepala Dinas, yang bertanggung jawab langsung pada Kepala Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertugas menyusun kebijakan dan program dalam kaitan dengan Anggaran Pembangunan Daerah 5 (Lima) Tahun (Repelita Daerah)
3. Dalam lingkungan Sekretariat ada bagian pembangunan yang bertugas sebagai koordinator proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah (dibedakan dari proyek yang dibiayai dengan bantuan pemerintah pusat), dan juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut dari segi fisik dan keuangan
4. Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut berbagai pajak retribusi dan pajak daerah, dari segi jumlah dan jenis penerimaan yang dipungut daerah masing-masing. Dinas Pendapatan Daerah juga bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan

semua penerimaan, tetapi nampaknya belum banyak yang berhasil menjalankan tugas ini.

5. Menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang serta menerbitkan cek atas nama pemerintah adalah tugas Kantor Perbendaharaan Daerah. Biasanya tugas kantor perbendaharaan ini dijalankan oleh Bank Sulawesi Selatan (BSS), yang merupakan Bank Daerah yang didirikan di semua propinsi dan menjadi milik bersama pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bank Sulawesi Selatan juga bertindak sebagai Bank Daerah, tetapi kedua peranan ini dianggap berbeda. Kantor Pembendaharaan Daerah bertanggung jawab langsung pada Kepala Daerah.
6. Masing-masing Pemerintah Daerah memiliki Inspektorat (Inspektorat Wilayah Daerah), yang tugasnya mencakup memeriksa keuangan daerah.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unit kerja memberikan pelayanan kepada Publik dan memfasilitasi kegiatan Dewan, maka bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan melaporkan hasil Kinerjanya kepada Pimpinan Dewan atas penggunaan anggaran yang diterima dan dikeluarkan serta mengkoordinasikan Kinerjanya melalui Sekretaris Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Badan Legislatif yang ikut merumuskan peraturan, meninjau/mengawasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta

merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang disetujui bersama Pimpinan DPRD dan Rancangan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang dialokasikan kedalam PPA untuk setiap Program SKPD.

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang di-kemukakan oleh Halim (2004:84) diringkaskan sebagai berikut: 1) tanggungjawab. Artinya, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Masyarakat Umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan (setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu) dan pengawasan (tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya); 2) mampu memenuhi kewajiban keuangan. Artinya, keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang; 3) kejujuran. Artinya, urusan keuangan harus di serahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil; 4) hasil guna dan daya guna. Artinya, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program

dapat di rencanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya; dan 5) pengendalian. Artinya, Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan tugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai. Dalam hal ini agar semua tujuan. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran pengelolaan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Berikut diuraikan unsur-unsur dalam pengelolaan keuangan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholiz (2007:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik

daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan

terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 4) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum yang merupakan penyanggah utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi berkurang. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksud untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Tujuan dari transfer ini adalah untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan pusat serta antar daerah.
- 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus

merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahun. Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang

penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, seiring perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pengelolaan keuangan daerah sejak pemberlakuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kategorisasi belanja daerah selalu mengalami perubahan nama.

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Pembiayaan Daerah

Mengkaji tentang konsep pembiayaan pemerintah, menurut Pudjosukanto (1993:54) menyatakan bahwa pembiayaan pemerintah dibedakan penerimaan dan pengeluaran daerah mulai dari pembiayaan rutin, pembiayaan pembangunan, pembiayaan kebutuhan SDM dan pembiayaan untuk penyediaan sarana dan prasarana. Mekanisme pembiayaan pemerintah ini diterapkan menurut pemberiannya yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Pada instansi pemerintah penggunaan konsep pembiayaan tidak terlepas dari pemaksanaan belanja dan pendanaan yang dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan kelancaran roda aktivitas organisasi. Sebuah aktivitas senantiasa ditunjang oleh penggunaan pembiayaan untuk peruntukan aktivitas rutin, pelaksanaan pembangunan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan pengadaan sarana dan prasarana.

Pudjosukanto (1993:68) menjelaskan hubungan aktivitas dengan kegiatan pembiayaan yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Aktivitas membutuhkan adanya pembiayaan rutin dalam melakukan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya diperlukan adanya pembiayaan pembangunan, pembiayaan pengembangan SDM dan pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana. Semakin terpenuhi pembiayaan yang dibutuhkan, semakin lancar roda aktivitas berjalan dalam mencapai tujuan organisasi.

Konsep pembiayaan organisasi di atas menjelaskan bahwa aktivitas kerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari adanya beban pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam mewujudkan kelancaran aktivitas kerja dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembiayaan pembangunan SDM dan pembiayaan penyediaan sarana prasarana mempengaruhi aktivitas kerja yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adisasmitha (2011:15) yang mengamati faktor-faktor pembiayaan yang mempengaruhi pembiayaan pemerintah dengan merekomendasikan bahwa faktor pembiayaan rutin, pembiayaan pembangunan memberikan pengaruh terhadap terlaksananya sebuah kegiatan dalam suatu organisasi. Sedangkan pembiayaan pengembangan SDM dan

ketersediaan sarana dan prasarana memberikan pengaruh terhadap kelancaran kegiatan suatu organisasi.

Berarti pembiayaan rutin memberikan pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah karena terdapat penilaian pembiayaan transaksi yang mengalami peningkatan dalam setiap pembiayaan kegiatan. Pembiayaan rutin tersebut berupa gaji, pembiayaan pengadaan administrasi dan pembiayaan operasional telah diposkan pembiayaannya setiap bulan untuk pelaporan tahunan, yang terkadang mengalami peningkatan. Pudjosukanto (1993:121) menyatakan bahwa pembiayaan suatu organisasi atau pemerintah mengalami perubahan dalam penentuan pos pembiayaan rutin tergantung perubahan tingkat harga yang mempengaruhi pembiayaan untuk melakukan penyusunan penyesuaian anggaran.

Pembiayaan rutin diperlukan untuk pembayaran gaji, pengadaan administrasi dan kegiatan operasional sebagai pembiayaan pemerintah melalui penetapan pembiayaan transaksi yang jelas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Termasuk pula penggunaan pembiayaan pembangunan yang dikeluarkan meliputi pembiayaan pengadaan pembangunan, pemeliharaan/perawatan bangunan, dan penyediaan infrastruktur bangunan yang dipembiayai sesuai alokasi pembiayaan pemerintah yang penetapannya disesuaikan dengan pembiayaan transaksi. Mamesah (1992:47) menyatakan besarnya pembiayaan

pembangunan dalam estimasi penganggarnya disesuaikan dengan peruntukan bangunan, jenis bangunan, dan strategi tata letak bangunan yang mengacu kepada prosedur pengadaan, pemeliharaan/perawatan dan pengadaan infrastruktur bangunan.

5. Konsep Kinerja Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan adanya perubahan ekonomi di samping itu sudah tentu terjadi kenaikan output. Pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan akan tetapi dalam pertumbuhan, belum tentu mencakup unsur pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi yang terus menerus serta dapat mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan paling utama dari keberlangsungan pembangunan (Adisasmita, 2011:24).

Jhingan (1999:67) menyatakan faktor utama perkembangan ekonomi adalah terpenuhinya proses inovasi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan merupakan kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta, inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas.

Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (1997:25) proses pertumbuhan ekonomi diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka improvisasi dan inovasi baru yang pada gilirannya mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Aliran klasik membagi teori pertumbuhan ekonomi modern menjadi dua yaitu menekankan pentingnya akumulasi modal (*physical capital formation*) dan peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital*), sehingga berdampak pada penekanan aspek penawaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut model Harrod-Domar dalam Lincoln Arsyad (1999:125) pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital (*capital output ratio*). Untuk tumbuh secara berkelanjutan, masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar tabungan, makin besar investasi dan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebaliknya makin rendah produktivitas kapital (modal) atau semakin tinggi *capital output ratio*, maka makin rendah pertumbuhan ekonomi.

Adisasmita (2011:26) menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau

negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi adalah untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat.

Lebih lanjut Adisasmita (2011:26) menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah:

- a. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
- b. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
- c. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauhmana

kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi data PDRB adalah data PDRB atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu. Tanpa memperhitungkan tekanan inflasi. PDRB selain digunakan untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi, bermanfaat pula untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dihitung dengan menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena pertumbuhan PDRB dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat daripada tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDRB (Adisasmita, 2011:27) .

Kinerja ekonomi daerah merupakan suatu hal yang hampir selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan kinerja ekonomi daerah. Dalam hal ini, proses kinerja ekonomi daerah suatu negara atau daerah haruslah mengandung aspek kinerja ekonomi daerah sebagai salah satu unsur pokoknya. Adisasmita (2011:25) kinerja ekonomi daerah adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu input, proses, output per kapita dalam jangka panjang.

Berdasarkan pengertian di atas kinerja ekonomi daerah adalah pertumbuhan output regional yang dinyatakan dalam pendapatan per kapita yang mendorong kegiatan ekonomi lainnya dan pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta peluang berusaha dalam waktu jangka panjang.

Kinerja ekonomi daerah adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi kinerja ekonomi daerah yang lain adalah bahwa kinerja ekonomi daerah terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Kinerja ekonomi daerah menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, menganalisis sebab berlakunya kinerja ekonomi daerah dan faktor yang menentukan kinerja ekonomi daerah. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi.

Teori inovasi Schumpeter yang menekankan pada faktor inovasi entrepreneur sebagai motor penggerak kinerja ekonomi daerah kapitalistik. Dinamika persaingan akan mendorong hal ini (Adisasmita, 2011:122).

Model pertumbuhan Harrot-Domar, teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju kinerja ekonomi daerah natural yaitu angka laju kinerja ekonomi daerah natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

Model Input-Output Leontief, yang merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan kinerja ekonomi daerah dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

Model pertumbuhan Lewis merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak (padat) penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

Model kinerja ekonomi daerah Rostow menekankan tinjauannya pada sejarah tahap-tahap kinerja ekonomi daerah serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat

tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsumsi tinggi.

Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai kinerja ekonomi daerah adalah, pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertumbuhannya. Elemen-elemen yang memacu kinerja ekonomi daerah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sumber-sumber Alam, meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sedikitnya sumber-sumber alam yang dimiliki merupakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.
2. Sumber-sumber tenaga kerja, masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.

3. Kualitas tenaga kerja yang rendah, negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.
4. Akumulasi kapital yang memerlukan pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang selama beberapa decade. Di negara sedang berkembang, tingkat pendapatan rendah pada tingkat batas hidup mengakibatkan usaha menysihkan tabungan sukar dilakukan. Akumulasi kapital tidak hanya berupa truk, pabrik baja, plastik dan sebagainya; tetapi juga meliputi proyek-proyek infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi industrialisasi dan pengembangan serta pemasaran produk-produk sektor pertanian. Akumulasi kapital sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam kinerja ekonomi daerah. Usaha-usaha untuk mendorong laju kinerja ekonomi daerah dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini karena, pertama, hampir semua negara-negara sedang berkembang mengalami kelangkaan barang-barang modal berupa mesin-mesin dan peralatan produksi, bangunan pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. Kedua, penambahan dan perbaikan kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan tersedianya tanah yang bisa ditanami.

Kinerja ekonomi daerah merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Rendahnya tabungan – investasi masyarakat (sektor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat kinerja ekonomi daerah. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju oleh kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.

Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan

menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.

Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian kinerja ekonomi daerah yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi; tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

Kinerja ekonomi daerah dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Kinerja ekonomi daerah dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya kinerja ekonomi daerah merupakan indikasi keberhasilan kinerja ekonomi daerah.

Kinerja ekonomi daerah suatu wilayah dapat diukur dengan cara membandingkan Gross National Product (GNP) tahun yang sedang berjalan dengan GNP tahun sebelumnya. Contoh kasus, jika diketahui GNP suatu negara tahun 2007 sebesar Rp 80.000 miliar dan tahun 2008 sebesar Rp.85.000 miliar, maka laju kinerja ekonomi daerah tahun 2008 akan lebih besar.

Pada masa orde baru, Indonesia pernah tercatat sebagai negara dengan kinerja ekonomi daerah paling spektakuler di Asia, walaupun

lebih banyak di bangun oleh utang luar negeri yang menjadi beban generasi sekarang. Namun demikian, kinerja ekonomi daerah nasional dengan upaya-upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah senantiasa di dorong untuk dinaikkan.

Teori kinerja ekonomi daerah dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan tentang konsep kinerja ekonomi daerah, secara umum teori tersebut sebagai berikut (Jhingan, 1999:59):

1. Teori kinerja ekonomi daerah historis dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:
 - a. Werner Sombart (1863-1947) kinerja ekonomi daerah suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:
 - 1) Masa perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa perekonomian ini memiliki ciri-ciri: kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri, setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen dan belum ada pertukaran barang dan jasa.

- 2) Masa kerajinan dan pertukangan. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: meningkatnya kebutuhan manusia, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, timbulnya pertukaran barang dan jasa dan pertukaran belum didasari *profit motive*.
- 3) Masa kapitalis. Pada masa ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis). Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja (kaum buruh). Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat masa yaitu:
 - a) Tingkat prakapitalis, masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu: kehidupan masyarakat masih statis, bersifat

kekeluargaan, bertumpu pada sektor pertanian, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan hidup secara berkelompok.

- b) Tingkat kapitalis, masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu: kehidupan masyarakat sudah dinamis, bersifat individual, adanya pembagian pekerjaan dan terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan.
 - c) Tingkat kapitalisme raya, masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu: usahanya semata-mata mencari keuntungan, munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi, produksi dilakukan secara massal dengan alat modern, perdagangan mengarah kepada ke persaingan monopoli dan dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu majikan dan buruh.
 - d) Tingkat kapitalisme akhir, masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu: munculnya aliran sosialisme, adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi, mengutamakan kepentingan bersama.
- b. Friedrich List (1789-1846), kinerja ekonomi daerah suatu bangsa dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu masa berburu dan pengembaraan, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, dan masa kerajinan, industri, perdagangan

- c. Karl Bucher (1847-1930), kinerja ekonomi daerah suatu bangsa dapat dibedakan menjadi empat tingkatan yaitu masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia.
- d. Walt Whitman Rostow (1916-1979) mengungkapkan teori kinerja ekonomi daerah dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 (lima):
- 1) Masyarakat tradisional (*the traditional society*) yang merupakan masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai;
 - 2) Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (*the preconditions for take off*) merupakan tingkat kinerja ekonomi daerah dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi dan sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri;
 - 3) Periode lepas landas (*the take off*) merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang

pada pertumbuhan yang berkelanjutan, kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong kinerja ekonomi daerah diperluas, tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat, investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional.

2. Teori klasik dan neoklasik

a. Teori Klasik

- 1) Adam Smith beranggapan bahwa kinerja ekonomi daerah sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk maka akan terdapat penambahan output atau hasil.
- 2) David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*stationary state*).

b. Teori Neoklasik

- 1) Robert Solow berpendapat bahwa kinerja ekonomi daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern

dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

- 2) Harrod Domar beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena kinerja ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja

Jhingan (1999:115) menyatakan perbedaan antara pertumbuhan dan kinerja ekonomi daerah adalah bahwa kinerja ekonomi daerah keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan kinerja ekonomi daerah lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Adapun persamaan antara pertumbuhan dan kinerja ekonomi daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi.
2. Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita.
3. Kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
4. Kedua-duanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat.

6. Laporan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2002:23) menyatakan bahwa laporan keuangan daerah pada prinsipnya membahas aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN dan pendapatan-pendapatan asli daerah yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan tingkat realisasi yang tercantum dalam neraca keuangan yang sesuai pencatatan laporan keuangan. Pada prinsipnya inti dari laporan keuangan daerah mencakup:

a. Target Anggaran

Target anggaran adalah suatu ketetapan dari pengalokasian anggaran yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan alokasi anggaran yang digunakan. Bentuk pencapaian target anggaran biasanya disesuaikan dengan penggunaan dan pembiayaan anggaran tersebut dari sumber-sumber penerimaan dan pendapatan anggaran (Soemantri, 2003:71).

Pada dasarnya target anggaran merupakan unsur dari suatu aktivitas alokasi anggaran yang telah direncanakan, dan dilaporkan sesuai dengan aktivitas efisiensi dan anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja publik, penentuan target anggaran merupakan suatu bentuk kemampuan pemerintah di dalam mengelola keuangan. Bagi

pemerintah daerah, hal tersebut merupakan bentuk dari suatu aktivitas mengelola anggaran keuangan daerah sesuai dengan target anggaran yang akan dicapai atau yang dikeluarkan dalam suatu periode anggaran tahunan (Anshory, 2004:51).

Menentukan suatu target anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Anshory (2004:52) menyatakan bahwa keberhasilan suatu pengelolaan anggaran daerah apabila pengelolaan tersebut mengalami persentase tambahan dalam setiap tahunnya dari target anggaran yang telah ditetapkan atau setelah perubahan anggaran yang ditetapkan. Pada intinya, target anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penerimaan dan belanja daerah, kebutuhan penerimaan dan belanja tidak langsung (pembangunan) dan penerimaan belanja pegawai.

Inti dari penentuan target anggaran dalam pelaksanaan atau pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui tingkat pencapaian anggaran yang dicapai dalam setiap tahun periode anggaran, sehingga dapat diukur tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan suatu kemampuan pelaksanaan pengelolaan anggaran dari berbagai sumber penerimaan/pendapatan, yang disesuaikan dengan tingkat

besarnya pembiayaan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu organisasi (Nasrullah, 2004:79).

Berbagai aktivitas perencanaan dan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan merupakan bentuk dari suatu aktivitas pencapaian realisasi untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan realisasi anggaran yang diterapkan atau dilaksanakan, maka pengertian realisasi anggaran menurut Anshory (2004:53) realisasi anggaran keuangan daerah adalah aktivitas di dalam mengelola sumber-sumber pendapatan / penerimaan yang menjadi aset keuangan bagi suatu daerah. Kemampuan untuk melakukan kegiatan realisasi pengelolaan keuangan daerah, ditentukan oleh kemampuan suatu daerah memanfaatkan potensi keuangan daerah untuk mencapai perolehan berupa penerimaan atau pendapatan yang menjadi kontribusi APBD.

Lukman (2004:69) menyatakan bahwa realisasi anggaran menjadi patron/ukuran dalam melihat suatu aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan menjadi meningkat dan dianggap berhasil dalam pengelolaannya apabila realisasi anggaran lebih besar dari target yang ditetapkan. Artinya kemampuan di dalam mengelola keuangan untuk menghasilkan

penerimaan/pendapatan lebih besar daripada pembiayaan atau pengeluaran dari suatu proses pengelolaan keuangan.

Sudarmo (2004:125) memahami pandangan mengenai pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan realisasi anggaran yang optimal dan minimum sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dalam merealisasikan pengelolaan keuangan daerah. Realisasi keuangan menjadi patron/ukuran bagi setiap pelaksana atau pengelola keuangan untuk terus melakukan peningkatan realisasi pendapatannya.

Berkaitan dengan realisasi anggaran pada pelaksanaan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu diperlukan adanya suatu pengembangan realisasi anggaran yang diatas dari target yang telah ditetapkan, sehingga penerapan realisasi anggaran diupayakan untuk disosialisasikan dengan baik, sesuai dengan porsi pos-pos pengeluaran yang diminimalkan untuk menghasilkan realisasi optimal.

Pada intinya realisasi anggaran dari pengelolaan keuangan daerah bertumpu kepada kemampuan dalam melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan pos-pos pengeluaran/pembiayaan dalam rangka meminimalkan atau meningkatkan pencapaian realisasi anggaran di atas target yang telah ditetapkan.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu contoh penelitian yang diambil untuk dijadikan sebagai acuan dan pembanding dalam rangka memudahkan dalam melakukan suatu penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang diambil adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini khususnya penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian pengelolaan keuangan daerah secara spesifik meneliti mengenai realisasi APBD yang memengaruhi kinerja ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pada penelitian ini yang hampir sama dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Zimroben Ompusunggu (2010), dimana perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel pembiayaan daerah yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Siti Anni Makrifah (2010) dengan judul : *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Analisis data menggunakan analisis cluster dan analisis kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang

maupun jangka pendek. Jenis belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek, sementara belanja pegawai hanya berpengaruh dalam jangka pendek. Alokasi belanja mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi, akan tetapi pengaruhnya yang dapat dilihat dari kontribusinya sangat kecil. Hal ini menunjukkan adanya peran swasta dan peran pemerintah yang lebih tinggi dalam proses pembangunan kabupaten/kota di Jawa Timur.

- b. Zimroben Ompusunggu (2010) dengan judul : *Analisis Pengaruh Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari delapan kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Program Eviews*, yaitu suatu program aplikasi yang mampu menganalisis data secara lengkap. Model analisis yang digunakan adalah analisis data panel, yaitu dengan mengelompokkan data-data variabel dalam kelompok *cross section* dan *time series*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa realisasi PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah dan realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara simultan maupun secara parsial.
- c. Fitrianti dan Pratolo (2009), dalam studi tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap rasio

kemandirian dan pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 - 2007 di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap rasio kemandirian, serta pengaruh signifikan antara belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian.

- d. Hadi Sasana (2009) dengan judul *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Penelitian ini menggunakan metode analisi jalur. Temuan dari penelitian ini adalah Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, namun berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.
- e. Dedy Rustiono (2008) dengan judul *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa PDRB Propinsi Jawa Tengah sangat fluktuatif dan nilainya jauh tertinggal dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Jawa dalam periode pengamatan yang sama. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu tahun 1985-2006 dan

menggunakan analisa regresi “*Ordinary Least Square*” (OLS) dengan bantuan perangkat lunak SPSS 11.5. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis dan memberi arah yang negatif. Sebagai upaya meningkatkan PDRB Propinsi Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah. Pengembangan usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

- f. Rahmansyah (2004) dengan judul *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 - 2003 pengeluaran pemerintah yang dialokasikan sebagai belanja daerah dalam APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 11 provinsi di Indonesia, yaitu

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda.

- g. Armayani (2001) dengan judul *Pengaruh Anggaran Pembangunan dan Tenaga Kerja terhadap Kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Wajo*. Hasil tesis tersebut memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan anggaran pembangunan (publik) berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Setiap kenaikan anggaran sebesar 1%, maka kinerja ekonomi daerah riil akan meningkat sebesar 0.23%, sehingga ketersediaan anggaran pembangunan (publik) setiap tahunnya harus tetap dipertahankan.

Lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Analisis Data	Temuan	Kesesuaian Teori
1	Siti Anni Makrifah (2010)	<i>Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur</i>	PAD, Belanja Pemerintah, PDRB, IPM	Cluster, Analisis Keuangan Daerah	Belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jenis belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek, sementara belanja	Relevan dengan variabel yang diteliti

					pegawai hanya berpengaruh dalam jangka pendek	
2	Zimroben Ompusunggu (2010)	Analisis Pengaruh Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, belanja daerah, PDRB	Analisis data panel	Realisasi PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah dan realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara simultan maupun secara parsial	Relevan dengan variabel yang diteliti
3	Fitrianti dan Pratolo (2009)	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian dan pertumbuhan ekonomi	PAD, Belanja Pembangunan, PDRB	Regresi Linier Berganda	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap rasio kemandirian, serta pengaruh signifikan antara belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian.	Relevan dengan variabel yang diteliti
4	Hadi Sasana (2009)	Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Desentralisasi fiskal, Tenaga Kerja, Kemiskinan, Kesejahteraan, Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Jalur	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, namun berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin	Relevan dengan variabel yang diteliti
5	Deddy Rustiono (2008)	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap	Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, PDRB	Ordinary Least Square (OLS)	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah	Relevan dengan variabel yang diteliti

		Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah			memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis dan memberi arah yang negatif. Sebagai upaya meningkatkan PDRB Propinsi Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah	
6	Rahmansyah (2004)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Daerah, PDRB	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1999 - 2003 pengeluaran pemerintah yang dialokasikan sebagai belanja daerah dalam APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 11 provinsi di Indonesia, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda	Relevan dengan variabel yang diteliti
7	Armayani (2001)	Pengaruh Anggaran Pembangunan dan Tenaga Kerja terhadap Kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Wajo	Anggaran pembangunan dan tenaga kerja terhadap kinerja ekonomi daerah	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan anggaran pembangunan (publik) berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah	Relevan dengan variabel yang diteliti

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berisi penjelasan tentang pemikiran peneliti mengenai hubungan antar variabel yang diteliti yaitu variabel bebas berupa pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan variabel terikat yaitu kinerja ekonomi daerah yang berasal dari tingkat perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan keuangan untuk menggunakan APBD dalam menunjang peningkatan kinerja ekonomi daerah sesuai dengan tingkat perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ada tiga variabel pengelolaan keuangan daerah yang dipertimbangkan untuk berbagai penggunaan APBD sesuai dengan pos anggaran yang digunakan yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ketiga unsur ini merupakan aspek penting penggunaan anggaran yang memperlihatkan kemampuan daerah dalam menggunakan anggaran untuk peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Identitas keseimbangan pendapatan nasional adalah konsumsi (C) ditambah Investasi (I), Pembelian atau Pengeluaran Pemerintah (G), dan Ekspor (X) dikurangi Impor (M) yang dirumuskan dengan persamaan $Y = C + I + G + X - M$ merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

1. Hubungan Pendapatan terhadap Kinerja Ekonomi Daerah

Variabel pendapatan (X_1) yang ingin dicermati meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat – dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan alokasi khusus), transfer pemerintah pusat lainnya (dana penyesuaian) dan transfer pemerintah provinsi (pendapatan bagi hasil pajak).

Meningkatnya realisasi pendapatan tentu akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa realisasi pendapatan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak yang langsung menjadi beban masyarakat suatu daerah yang bersangkutan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang artinya jika pendapatan pemerintah dari sektor pajak yang menjadi beban masyarakat daerah semakin tinggi, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan menurun.

Menurut *World Bank* (1997), desentralisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Argumen pertama adalah bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik,

sehingga efek dinamisnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu didapat hubungan positif antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah bahwa desentralisasi dapat membuat ketidakstabilan makroekonomi, yang mana akan menghalangi pertumbuhan ekonomi, oleh karenanya didapat hubungan negatif antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi.

2. Hubungan Belanja terhadap Kinerja Ekonomi Daerah

Variabel belanja daerah (X_2) yang dicermati terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Belanja modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Transfer terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil pendapatannya.

Belanja daerah yang dianalogikan sebagai pengeluaran/belanja pemerintah (*government expenditure*) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer adalah sejumlah belanja yang bersumber dari pendapatan/penerimaan pemerintah daerah yang teralokasi terhadap sektor-sektor ekonomi daerah, sehingga dapat diyakini bahwa semakin besar bagian dari penerimaan pemerintah yang dibelanjakan ke sektor-sektor ekonomi tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi.

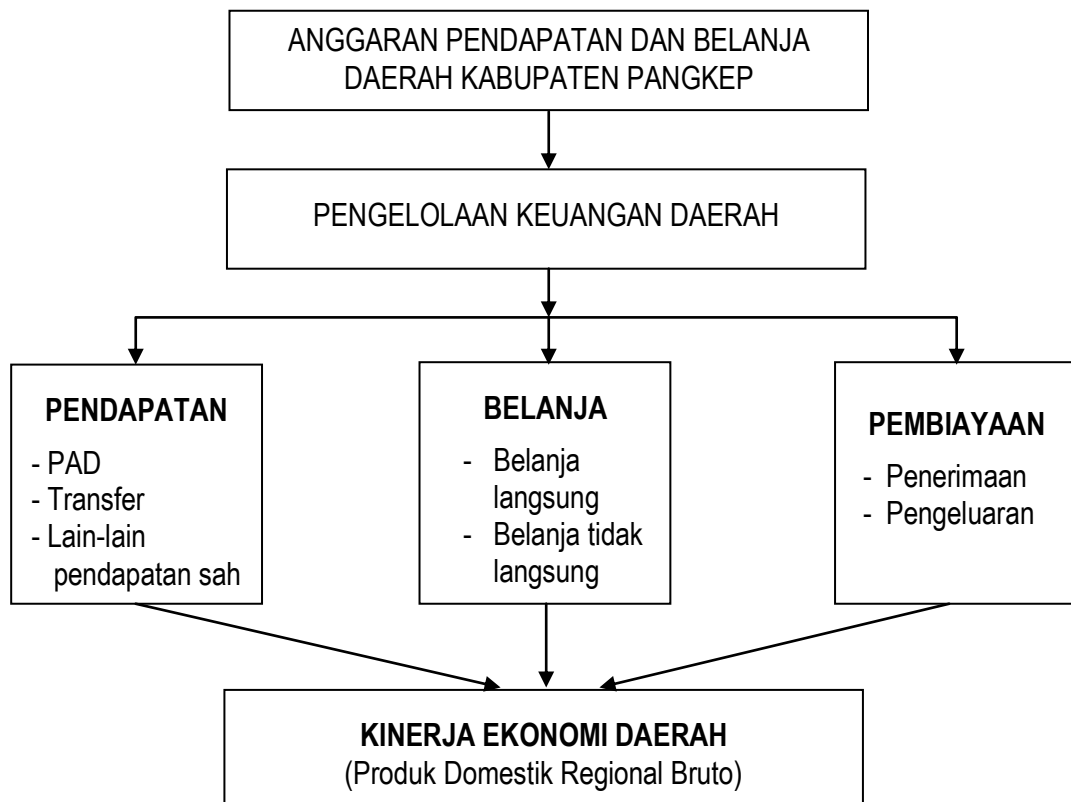
3. Hubungan Pembiayaan terhadap Kinerja Ekonomi Daerah

Variabel pembiayaan (X_3) yang dicermati terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran daerah meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997). Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

Berdasarkan uraian di atas, berikut kerangka konseptual penelitian ditunjukkan dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



C. Hipotesis

Mengacu pada rumusan masalah dan uraian yang dikemukakan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep secara simultan.

2. Diduga pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep secara parsial.